

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah terus mendorong peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui penerapan standar nasional. Akreditasi tidak sekadar formalitas administratif untuk memperoleh sertifikat, melainkan merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan. Dalam hal ini, pengelolaan obat menjadi bagian penting dari layanan kesehatan dasar yang harus memenuhi kriteria kualitas serta menjamin keselamatan pasien. Puskesmas, sebagai pelaksana layanan primer, bertanggung jawab memastikan pelayanan yang tersedia tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Menteri Kesehatan, 2023).

Salah satu komponen penting dalam pelayanan kefarmasian adalah manajemen obat. Pengelolaan obat yang dilakukan secara tepat di puskesmas memiliki dampak langsung terhadap efektivitas terapi. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keberlanjutan, serta keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara efisien, rasional, dan ekonomis, disertai dengan pelaksanaan sistem pengendalian mutu.

Pengendalian internal menjadi aspek esensial dalam operasional organisasi guna mencegah penyalahgunaan dan melindungi aset. Sistem pengendalian ini juga memastikan bahwa prosedur organisasi dijalankan oleh seluruh personel secara disiplin (Daos & Angi, 2019). Dalam konteks pelayanan kesehatan, manajemen persediaan obat menjadi sangat krusial karena memengaruhi kinerja dan mutu layanan (Fajar *et al.*, 2017).

Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan obat bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta menyusun langkah-langkah perbaikan demi peningkatan kualitas layanan. Tanpa pengelolaan yang sistematis, risiko seperti kekosongan stok, kedaluwarsa obat, hingga pemborosan anggaran akan semakin besar. Oleh sebab itu, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan langkah strategis dalam menjamin tata kelola obat yang optimal.

Menurut penelitian oleh Sariah dan koleganya, pengelolaan yang tidak mengikuti prosedur dapat menyebabkan berbagai persoalan seperti kekurangan persediaan, penumpukan obat akibat perencanaan yang tidak akurat, serta meningkatnya risiko kedaluwarsa (Sariah *et al.*, 2022). Studi lainnya di Puskesmas Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang menemukan bahwa meskipun beberapa indikator seperti jumlah stok kosong, nilai obat kedaluwarsa, dan kerusakan obat sudah sesuai standar, indikator lainnya seperti ITOR dan stok berlebih belum tercapai (Rintanantasari *et al.*, 2021). Permasalahan juga muncul dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang masih dilakukan secara manual, berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data (Fauziah *et al.*, 2024). M. Randi dan timnya mencatat bahwa kesalahan dalam pencatatan dapat menyebabkan kehilangan obat akibat administrasi yang tidak akurat (M.Randi *et al.*, 2024).

Dari berbagai studi awal tersebut, terlihat bahwa banyak Puskesmas masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan obat yang belum mencapai hasil optimal. Keterbatasan ini mencakup aspek pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, hingga evaluasi, yang semuanya berdampak pada mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Kinerja dalam hal pengelolaan obat juga berkontribusi terhadap capaian akreditasi. Akreditasi berfungsi sebagai instrumen kontrol mutu yang menilai sistem manajemen obat secara menyeluruh. Dengan adanya akreditasi, Puskesmas diharapkan mampu menjalankan pengelolaan obat sesuai standar, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu melakukan kajian komparatif antar Puskesmas di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung. Tujuannya adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan obat serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan capaian indikator mutu. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan pengelola fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan obat sesuai standar yang telah ditetapkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana tingkat kesesuaian pengelolaan obat di Puskesmas wilayah Kota dan Kabupaten Bandung berdasarkan indikator pengendalian dan evaluasi sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh Satibi melalui metode Delphi?

## **1.3 Tujuan Peneliti**

Mengetahui tingkat kesesuaian pengelolaan obat di Puskesmas Kota dan Kabupaten Bandung berdasarkan indikator pengendalian dan evaluasi, menggunakan standar yang telah disusun oleh Satibi dan tim.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Sebagai sarana pengembangan wawasan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi di Program Studi Farmasi Universitas Bhakti Kencana.

### **1.4.2 Bagi Instansi**

Memberikan masukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan sistem manajemen pengelolaan obat di Tiga Puskesmas yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung.

### **1.4.3 Bagi Institusi**

Menjadi tambahan referensi ilmiah untuk kepentingan akademik dan penelitian lanjutan di masa mendatang.